

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Konsep Lembaga Filantropi

##### 1. Definisi Lembaga Filantropi

Lembaga filantropi adalah sebuah organisasi yang aktif dalam bidang sosial, pendidikan, dan keagamaan, bertujuan untuk mempromosikan solidaritas, kepedulian terhadap masyarakat muslim kelas menengah bawah, dan nilai-nilai kemanusiaan. Lembaga filantropi berperan dalam mengumpulkan dana yang kemudian dialokasikan kepada masyarakat muslim yang membutuhkan melalui program-program khusus, dengan tujuan mengurangi tingkat kemiskinan.<sup>1</sup>

Definisi lain dari lembaga filantropi adalah organisasi atau lembaga yang memberikan manfaat sosial dalam bentuk program dan mendukung perekonomian suatu negara.<sup>2</sup> Bantuan tersebut bisa berupa barang atau jasa yang membantu dalam berbagai sektor. Khususnya, sektor sosial, sektor pendidikan, sektor keagamaan, dan lainnya. Di Indonesia sendiri, terdapat banyak sekali organisasi dermawan, antara lain: Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Rumah Zakat, Dompot Dhuafa, Greeneration Foundation, Human Initiative, The Nature Conservancy (TNC), dan masih banyak lagi.

##### 2. Tujuan Lembaga Filantropi

Pada prinsipnya organisasi filantropi menawarkan bantuan untuk meningkatkan kesejahteraan umat Islam, sehingga tujuannya bukan mencari keuntungan atau nirlaba.<sup>3</sup> Dana didapat melalui berbagai

---

<sup>1</sup> Madjakusumah and Saripudin, "Pengelolaan Dana Lembaga Filantropi Islam Dalam Pengembangan Ekonomi Umat."

<sup>2</sup> Jeremy Youde, "The Role of Philanthropy in International Relations," *Review of International Studies* 45, no. 1 (2019): 39–56, <https://doi.org/10.1017/S0260210518000220>.

<sup>3</sup> Wisnu, "Mengenal Filantropi: Pengertian, Tujuan, Jenis, Dan Cara Menjadi Filantropis," <https://myrobin.id/>, 2023.

metode, termasuk penggalangan dana, transfer bank, sumbangan di kotak amal masjid, dan kemitraan dengan donatur.

Kita dapat yakin bahwa tujuan organisasi amal ini sangat jelas untuk memberikan layanan atau bantuan sosial kepada sejumlah besar individu.<sup>4</sup> Seperti lembaga, yayasan, jaringan, wakaf, amil zakat, dan hadiah dengan menggunakan berbagai sumber atau bayaran yang diperoleh dari pemberi atau sponsor.

Untuk mencapai tujuannya, lembaga filantropi sering kali bekerja sama dengan beberapa pihak, termasuk otoritas publik, untuk memberikan bantuan kepada individu yang kurang beruntung. Misalnya, ketika peristiwa bencana terjadi, mitigasi kemiskinan, program hibah pendidikan, pembangunan kantor kesejahteraan gratis, dan lain-lain. Secara pokok, tujuan lembaga filantropi adalah berorientasi pada membantu masyarakat yang memerlukan serta menyediakan solusi terhadap tantangan yang dihadapi oleh masyarakat.

### 3. Indikator Lembaga Filantropi

Lembaga filantropi memiliki karakteristik yang membedakannya dari organisasi lain. Adapun karakteristik lembaga filantropi adalah sebagai berikut.

#### a. Gesit dan Cepat Bergerak

Organisasi atau lembaga filantropi saat ini perlu menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi dengan cepat. Mengingat kapan peristiwa bencana atau keadaan krisis terjadi, lembaga-lembaga kemanusiaan harus bergerak cepat untuk mengumpulkan dan mengedarkan cadangan.

---

<sup>4</sup> Jenny Harrow et al., "The Management and Organization of Philanthropy: New Directions and Contested Undercurrents," *International Journal of Management Reviews* 23, no. 3 (2021): 303–11, <https://doi.org/10.1111/ijmr.12273>.

b. Fokus Pada Tujuan

Lembaga filantropi selalu fokus pada visi, misi, dan tujuan. Tujuan utamanya adalah menjadi lembaga filantropi yang tangguh, berkelanjutan, dan dapat diukur dengan baik.

c. Memperhatikan Donator

Lembaga filantropi sangat menyadari bahwa donatur merupakan elemen kunci dari organisasi. Oleh karena itu, pemberian yang diberikan hendaknya dipertanggungjawabkan secara lugas. Selain itu, organisasi amal berupaya menjaga hubungan positif dengan donatur.

d. Sumber Pendanaan Beragam

Organisasi kemanusiaan harus benar-benar mewaspadaai dana mereka. Berbagai sumber dukungan keuangan diminta untuk tidak menerima lebih dari 30% subsidi dari satu sumber. Sebab jika dana tersebut salah sasaran, maka organisasi akan menghentikan seluruh operasionalnya.

e. Dapat Menginspirasi Orang Lain

Selanjutnya, lembaga filantropi ditandai dengan kemampuannya untuk menginspirasi sukarelawan, donatur, dan stafnya untuk membentuk komunitas yang kokoh.

f. Cerdas Secara Digital

Teknologi telah mengubah cara lembaga filantropi menggalang dana dengan lebih profesional dan transparan. Pertumbuhan penggalangan dana online setiap tahun menekankan pentingnya bagi manajemen lembaga filantropi untuk terus meningkatkan pemahaman mereka tentang berbagai alat, situs web, aplikasi, dan platform baru. Pemanfaatan sistem digital dapat memperbaiki efisiensi operasional lembaga filantropi serta memperkuat daya saingnya untuk mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang berkelanjutan.

g. Mau Mendengarkan Kritik dan Saran

Akhirnya, salah satu fitur khas atau sifat yang melekat pada lembaga filantropi adalah kesediaannya untuk mendengarkan dan menerima kritik. Khususnya dari relawan, staf, dermawan dan masyarakat secara keseluruhan. Analisis dan ide diperlukan agar lembaga filantropi dapat mengembangkan proyek-proyek baru yang dapat mengatasi masalah penerima bantuan dengan lebih baik.

#### 4. Fungsi Lembaga Filantropi

Lembaga filantropi Islam memiliki peran penting dalam perekonomian karena merupakan instrumen pengalihan pendapatan orang kaya kepada orang miskin melalui zakat, infak, dan sedekah. Selain itu juga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan secara material, dan bisa juga berdampak positif terhadap peningkatan intelektual Lembaga filantropi. Konsep kedermawanan dalam Islam yang berupa zakat, infak, sedekah, dan wakaf bisa digunakan sebagai solusi permasalahan dalam bidang ekonomi dan sosial.<sup>5</sup>

### B. Konsep Manajemen *Fundraising*

#### 1. Definisi Manajemen *Fundraising*

Dalam bahasa Latin, manajemen berasal dari kata manus, yang berarti tangan, dan agree, yang berarti melakukan. Kata itu menjadi kata kerja manajer, yang berarti menangani. Dalam bahasa Inggris, "manajemen" diterjemahkan menjadi "manajemen" atau "pengelolaan", dan dalam bahasa Indonesia, "manajemen" diterjemahkan menjadi "pengelolaan" atau "manajemen".<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Irfan Syauqi Beik and Laily Dwi Arsyianti, "MEASURING ZAKAT IMPACT ON POVERTY AND WELFARE USING CIBEST MODEL," *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* 1, no. 2 (February 29, 2016): 141-60, <https://doi.org/10.21098/jimf.v1i2.524>.

<sup>6</sup> Husaini Usman, "Manajemen: Teori, Praktik, Dan Riset Pendidikan," 2013.

Namun, dalam kamus bahasa Inggris-Indonesia, "fundraising" berarti pengumpulan dana. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, "pengumpulan" berarti proses, cara mengumpulkan, penghimpunan, atau pengerahan, sedangkan "dana" berarti uang yang disediakan untuk keperluan (kesejahteraan, pemberian, hadiah, derma).<sup>7</sup> Oleh karena itu, penggalangan dana dapat didefinisikan sebagai suatu cara untuk mengumpulkan uang untuk kebaikan masyarakat dan kepentingan umum.

Menurut Hasanudin dalam Jurnal Manajemen Dakwah, *fundraising* adalah kegiatan mengumpulkan dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan, ataupun pemerintah) sehingga digunakan untuk program dan kegiatan operasional lembaga, yang pada akhirnya akan membantu mencapai misi dan tujuan lembaga.<sup>8</sup> Jadi, *fundraising* adalah ilmu dan seni yang memanfaatkan semua sumber daya dalam proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan untuk memastikan tujuan penggalangan dana tercapai secara efektif dan efisien.

## 2. Sistem Manajemen *Fundraising*

Sistem dalam manajemen fundraising merupakan penjabaran dari fungsi manajemen itu sendiri, maka sistem tersebut merupakan definisi dari proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan.

Dalam proses perencanaan maka sistem yang harus dilakukan adalah:

---

<sup>7</sup> Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Kamus Besar Bahasa Indonesia," 2018.

<sup>8</sup> Hasanudin, "Strategi Fundraising Zakat Dan Wakaf," *Jurnal Manajemen Dakwah*, 2013, II.

a. Perkiraan dan Perhitungan Masa Depan

Pada bagian ini suatu organisasi bisa melakukan perkiraan tentang kemungkinan terlaksannya kegiatan *fundraising*, mulai dari waktu, tempat atau kondisi organisasi

b. Penentuan dan Perumusan Sasaran

Dalam aspek ini bisa ditentukan sasaran yang kemudian dijadikan objek *fundraising*. Sementasai yang mana untuk dijadikan sasaran *fundraising*, kemudian ditentukan juga tujuannya agar bisa mencapai sasaran yang dikehendaki.

c. Penetapan Metode

Di aspek ini akan ditentukan metode apa yang cocok untuk melakukan *fundraising*, maka sangat banyak macam-macam metode *fundraising*. Hal ini bisa ditentukan terhadap kondisi dari lembaga atau objek *fundraising*.

d. Penetapan Waktu dan Lokasi

Pada bagian ini ditentukan mengenai gambaran atau langkah-langkah kegiatan yang nantinya dilaksanakan agar mencapai tujuan *fundraising*.<sup>9</sup>

e. Penetapan Program

Pada bagian ini ditentukan mengenai gambaran atau langkah-langkah kegiatan yang nantinya dilaksanakan agar mencapai tujuan *fundraising*.

f. Penetapan Biaya

Dalam bagian ini organisasi perlu memperkirakan biaya yang akan digunakan pada proses *fundraising* dan juga akan menentukan sasaran dana yang akan diperoleh. Kemudian pada proses pengorganisasian sistem yang harus dilakukan, yaitu:

---

<sup>9</sup> Hasanudin, "Strategi Fundraising Zakat Dan Wakaf," *Jurnal Manajemen Dakwah*, 2013, 28.

a. Pembagian dan Penggolongan Tindakan *Fundraising*

Pada tahap awal ini suatu lembaga akan membagi *fundraising* sesuai dengan metode dan strategi yang akan dijalankan, pembagian ini menjadi sangat penting karena pada pelaksanaannya bisa berbeda dan cara melakukannya pun bisa berbeda.

b. Perumusan dan Pembagian Tugas Kerja

Lalu pada bagian ini akan ditentukan pembagian tugas-tugas kerja dalam pelaksanaan *fundraising*, pembagian tugas inipun ditujukan agar tidak adanya yang *double* tugas, semua tugas telah dibagi habis dan tidak akan ada yang terbengkalai sehingga sasaran *fundraising* yang telah ditetapkan pada saat perencanaan dapat tercapai dengan efektif dan efisien.

c. Pemberian Wewenang

Terakhir, bagian ini anggota organisasi diberikan kejelasan terhadap wewenang, agar nantinya tidak terjadi *miss communication*.<sup>10</sup> Dalam sistem pergerakan langkah-langkah yang akan dilakukan adalah:

d. Pembimbingan

Pembimbingan adalah rentetan aktivitas manajemen seperti memerintah, menugaskan, memberi petunjuk dan memberi arah kepada bawahan untuk melanjutkan tugas mereka agar dapat tercapai dengan efektif dan efisien.

e. Pengkoordinasikan

Hasanudin, mengatakan yang dimaksud dari “Pengkoordinasikan ialah aktivitas manajemen dan fungsi manajemen yang kemudian dilakukan dengan cara

---

<sup>10</sup> Hasanudin, “Strategi Fundraising Zakat Dan Wakaf,” *Jurnal Manajemen Dakwah*, 2013, 29.

menghubung-hubungkan, memanunggalkan dan menyelaraskan anggota dan pekerjaan, sehingga nantinya berlangsung tertib dan beraturan kearah tujuan yang ingin dicapai.<sup>11</sup>

f. Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan pada dasarnya ialah kegiatan manajemen yang dilakukan dalam tindakan pemilihan dari berbagai kemungkinan untuk menyelesaikan persoalan dan perselisihan yang akan timbul saat proses pengelolaan organisasi.<sup>12</sup> Kemudian pada proses sistem pengawasan yang harus dilakukan, yaitu:

1) Menetapkan Standar

Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia yang diartikan dengan standar ialah ukuran tertentu lalu dipakai sebagai patokan.<sup>13</sup> Adapun syarat-syarat standar yang benar adalah:

- a) *Validitas*; kebenaran
- b) *Realibilitas*; terpercaya, handal
- c) *Sensitivitas*; kepekaan (kemampuan untuk membedakan)
- d) *Akseptabilitas*; bisa diterima untuk digunakan
- e) *Practicable*; bisa dipraktikan<sup>14</sup>

2) Pemeriksaan dan Penelitian

---

<sup>11</sup> Hasanudin, "Strategi Fundraising Zakat Dan Wakaf," *Jurnal Manajemen Dakwah*, 2013, 30.

<sup>12</sup> Hasanudin, "Strategi Fundraising Zakat Dan Wakaf," *Jurnal Manajemen Dakwah*, 2013, 31.

<sup>13</sup> Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia," *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta Balai Pustaka (1988): 858.

<sup>14</sup> E.K Mochtar Effendi, *Manajemen Suatu Pendekatan Berdasarkan Ajaran Islam*, Jakarta : PT Bhrata Karya Aksara (1986): h. 154.



Pada pemeriksaan dan penelitian terhadap *implementasi* kegiatan *fundraising*. Ada berbagai cara yang bisa dilakukan, yaitu:

- a) Peninjauan pribadi manajer
  - b) Laporan secara lisan
  - c) Laporan tertulis
  - d) Laporan penelitian terhadap perihal yang bersifat istimewa<sup>15</sup>
- 3) Membandingkan Antara Pelaksanaan Tugas dan Standar

Pada proses ini bisa diadakan penilaian apakah bisa proses *fundraising* dilakukan dengan baik atau malah sebaliknya. Jika ternyata proses *fundraising* dapat berjalan dengan baik, artinya pelaksanaan tugasnya telah sesuai dengan rencana dan nantinya bisa mencapai target yang telah ditentukan atau paling tidak dapat mendekati. Hal ini justru dapat dijadikan contoh pelaksanaan *fundraising* selanjutnya. Tetapi jika dalam prosesnya terdapat penyimpangan atau kesalahan dan tidak mencapai hasil yang ditentukan, maka manajer harus memfokuskan letak penyimpangan atau kealahan yang telah terjadi.<sup>16</sup>

Melakukan tindakan perbaikan terhadap kesalahan atau penyimpangan yang terjadi. Faktor-faktor penyebab terjadinya kesalahan atau penyimpangan, yaitu:

- a) Kurangnya kemampuan dari pihak pelaksana. Solusinya dengan dilakukan berupa penambahan, training atau penggantian tenaga pelaksana.

---

<sup>15</sup> Abd. Rosyad Shaleh, "Manajemen Dakwah Islam," (Jakarta : PT. Bulan Bintang, 1977), h. 144.

<sup>16</sup> Abad Rosyad Shaleh, "Manajemen Dakwah Islam," (Jakarta : PT. Bulan Bintang), 1997, h.147.

- b) Biaya dan waktu tidak tercukupi. Solusinya dengan melakukan perbaikan seperti penyesuaian biaya dan waktu dengan penyesuaian volume pekerjaan.
- c) Ketidakmampuan dari manajer saat mengelola setiap unsur yang dibutuhkan. Solusinya dengan meningkatkan kualitas pengelolaan melalui pelatihan. Seperti: *Organization Development* dan *Training Development*.<sup>17</sup>

### 3. Prinsip *Fundraising*

Prinsip seharusnya seperti menumbuhkan. Prinsip bukanlah seperti tali yang mengikat kebebasan berekspresi melalui program-program unggulan yang akan dikelola dan pastinya dijual dan memberdayakan. Lagi pula bukan seperti peluru yang tajam ingin mencabik-cabik keinginan suatu lembaga filantropi atau lembaga profesional. Hal seperti ini justru akan mempercepat jalannya lembaga filantropi untuk memberdayakan masyarakat melalui program unggulan.

Adapun prinsip-prinsip yang harus dipegang teguh oleh lembaga filantropi diantaranya, yaitu:

#### a. Harus Memahami Dasar Lembaga Filantropi

Menjadi pengelola lembaga filantropi tentu berbeda dengan SDM yang lainnya. Apa pun divisi yang menaungi SDM nantinya harus mempunyai pemahaman dasar mengenai pengelola dan ini sangat penting. Keharusan petinggi lembaga filantropi dalam memberikan dasar pemahaman kepada setiap calon pengelola perlu dirancang dengan baik. Kemudian SDM yang akan diterima bisa saja belum memahami sumber dana yang nantinya mereka kelola.

#### b. Implementasi Program yang Amanah

Memegang amanah menjadi suatu hal yang penting dan krusial, juga menjadi hal yang harus diperhatikan. Sebagai lembaga filantropi

---

<sup>17</sup> T. Hani Handoko, "Manajemen," (Yogyakarta : BPFE), 1999, h. 365.

yang akan menerima titipan dana dari masyarakat dan harus disampaikan secara jelas. Orang yang beriman disebut Al-mukmin karena menerima rasa aman dan amanah.

Menurut Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-sa'di rahimahullah “Amanah ialah sesuatu yang akan diemban oleh seseorang dan diperintahkan agar ditunaikan”. Lalu perintah Allah SWT saat menunaikan amanah sudah pasti tidak kurang, tidak bertele-tele dan sempurna, termasuk saat memegang amanah tentang kekuasaan dan harta sekaligus amanah mengenai menjaga rahasia.

c. Laporan yang Akuntabel

Kemudian setelah program bisa dirancang menjadi *masterpiece*, dilanjutkan dengan profesional dan amanah, lalu membuat laporan. Laporan yang akan dibuat bukan sekedar kepada bagian pengelola, namun juga dibuat untuk masyarakat umum atau publik dan bentuknya pun harus disertakan mengenai laporan keuangannya. Program tidak bisa berjalan jika tidak ada investasi dan dana operasional terhadap suatu program. Transparansi harus identik dengan laporan agar tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga filantropi akan tetap terjaga. Laporan juga tidak bersifat tahunan, namun lebih bagus jika laporan dijadikan sebagai bentuk pertanggungjawaban lembaga filantropi kepada masyarakat.<sup>18</sup>

Selanjutnya, prinsi-prinsi yang ada dalam manajemen *fundraising* yang harus diperhatikan, yaitu: Pertama, Prinsip *fundraising* ialah harus memberitahu dan menawarkan. Sebuah penelitian yang dilakukan sebuah organisasi amal menanyakan kepada masyarakat yang belum memberi sumbangan. Mereka berargumen bahwa tidak pernah diminta agar memberikan sumbangan.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> A. Ghofur, “Tiga Kunci Fundraising (Sukses Membangun Lembaga Nirlaba),” Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2018.

<sup>19</sup> Michael Norton, “Menggalang Dana,” Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2002, h. 11-12.

d. *Fundraising* Adalah Kepercayaan Terhadap Hubungan Masyarakat

Pada umumnya, donatur lebih tertarik memberikan sumbangan terhadap organisasi dalam kegiatan yang sangat mereka kenal. Hal ini berarti dalam reputasi organisasi terhadap hubungan masyarakat itu jauh lebih penting. Berkat kemajuan teknologi saat ini, adanya sosial media dijadikan sebuah hal yang sangat penting oleh organisasi dengan begitu mereka dapat membagikan pencapaian melalui e-flyer yang disebar luaskan kepada masyarakat, mendapatkan komentar mengenai kualitas kegiatan organisasi dari masyarakat umum bahkan dari para ahli dan tokoh-tokoh tertentu yang ada dikalangan masyarakat.<sup>20</sup>

e. Prinsip *Fundraising* yang Berarti Menjual

*Fundraising* adalah sebuah langkah-langkah yang terdiri dari, yaitu: Pertama, Membuktikan kepada calon donatur akan kebutuhan yang bisa lembaga penuhi dari kegiatan program lembaga. Biasanya, masyarakat atau instansi dengan mudah menjadi donatur jika mereka satu argumen bahwa kebutuhan itu sangatlah penting dan perlu ditindaklanjuti lebih jauh. Kedua, Sebuah lembaga perlu membuktikan dengan melakukan gerakan positif yang dapat membawa perubahan dengan begitu calon donatur merasa bahwa dukungan yang mereka berikan tidak sia-sia. *Fundraising* tidak bisa dikatakan sebagai meminta-minta namun *fundraising* memiliki arti yang jauh dari pada itu, yaitu melakukan suatu inovasi kegiatan bahwa memberikan sumbangan akan mewujudkan perubahan di masyarakat.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Miftahul Huda, "Pengelolaan Wakaf Perspektif *Fundraising*," *Kementrian Agama*, 2012.

<sup>21</sup> Michael Norton, "Menggalang Dana."

f. Pengucapan Terima Kasih

Dengan mengucapkan terima kasih itu salah satu cara menghargai dan mengakui akan kedermawanan donatur. Hal tersebut juga menjadi sebuah tindakan pada kepentingan sendiri yang memiliki artian sangat baik, donatur akan merasa sangat dihargai oleh lembaga dan kedepannya mereka siap untuk memberikan sumbangan lagi.<sup>22</sup>

g. Tanggung Jawab Akan Melapor

Jika lembaga mendapatkan dana dari donatur, maka lembaga harus bertanggung jawab untuk:

- 1) Memastikan jika dana tersebut dimanfaatkan dengan tujuan yang telah ditentukan.
- 2) Memastikan dana tersebut dimanfaatkan sebaik mungkin dan akan mencapai hasil yang positif.

Langkah terakhir yakni lembaga memberikan laporan dana secara terus-menerus setiap bulannya, bahkan jika donatur tidak memintanya maka terus beri laporan yang nyata. Berkaitan dengan program yang ditawarkan lembaga, maka setidaknya bisa memenuhi kebutuhan masyarakat.<sup>23</sup>

#### 4. Unsur-Unsur *Fundraising*

Unsur-unsur untuk melakukan *fundraising* terdiri dari empat, yaitu: Pertama, Analisis kebutuhan yang berisi mengenai kesesuaian dengan syari'a, lalu laporan pertanggung jawaban dan bermanfaat terhadap kesejahteraan masyarakat. Kedua, Segmentasi pasar adalah

---

<sup>22</sup> M. huda, "Pengelolaan Wakaf Perspektif Fundraising," *Kementrian Agama*, 2012, h.17.

<sup>23</sup> Mohammad Bayu Anggara, "ANALISIS STRATEGI PENGHIMPUNAN DAN PENDISTRIBUSIAN DANA WAKAF HASANAH DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Pada BNI Syariah Cabang Tanjung Karang)" (UIN Raden Intan Lampung, 2019).

suatu proses untuk mengelompokkan pasar dari keseluruhan menjadi kelompok-kelompok yang memiliki ciri khas sama dalam hal kebutuhan, perilaku, keinginan dan respon terhadap kegiatan pemasaran spesifik.<sup>24</sup>

Ketiga, Donatur merupakan lembaga berbadan hukum, organisasi dan perorangan. Profil calon donatur bisa difungsikan lebih awal agar mengetahui identitas mereka. Maka calon donatur yang perorangan dapat diketahui dalam bentuk CV (*curriculum vitae*) sedangkan calon donatur yang organisasi dapat diketahui dalam bentuk *company* profil organisasinya.<sup>25</sup>

Kempat, Produk merupakan suatu strategi agar memenangkan dan menguasai pandangan pikiran dari donatur atau masyarakat melalui kegiatan program yang telah ditawarkan. Dalam menentukan jumlah aset merupakan bagian dari strategi kunci pada suatu lembaga dengan konsekuensi dari regulasi yang ada, tingkat persaingan dan rendahnya minat masyarakat dalam menyalurkan sebagian harta yang mereka miliki.<sup>26</sup>

Saat melakukan *fundraising* akan banyak metode yang bisa kita gunakan. Pada dasarnya ada setidaknya dua jenis yang bisa kita gunakan, yaitu: Pertama, Metode langsung (*direct fundraising*) adalah metode dengan menggunakan cara-cara untuk melibatkan partisipasi langsung dan langsung berinteraksi sekaligus melihat respon dari calon donatur. Misalnya, melalui *direct advertising*, *direct mail* dan presentasi langsung. Kedua, Metode tidak langsung (*indirect fundraising*) adalah metode yang menggunakan cara-cara untuk tidak langsung melibatkan

---

<sup>24</sup> Jauhar Faradis, “Manajemen Fundraising Wakaf Produktif: Perbandingan Wakaf Selangor (PWS) Malaysia Dan Badan Wakaf Indonesia,” *Jurnal Asy-Syari’ah* 2 (2015): h. 508.

<sup>25</sup> Miftahul Huda, “Mengalirkan Manfaat Wakaf: Potret Perkembangan Hukum Dan Tata Kelola Waakaf Di Indonesia,” n.d., h.212.

<sup>26</sup> Miftahul Huda.

partisipasi, metode ini biasanya dapat dilakukan dengan promosi yang mengarah kepada kualitas lembaga yang kuat, tanpa adanya pengarahannya untuk donasi pada saat itu. Misalnya, Penyelenggaraan suatu program kegiatan dengan melalui perantara sehingga dapat menjalin relasi.<sup>27</sup>

## 5. Strategi *Fundraising*

Strategi *fundraising* merupakan bentuk dari pendekatan agar mencapai tujuan dan bisa berguna untuk membeda setiap aktivitas *fundraising* dari suatu organisasi filantropi. Pada umumnya strategi *fundraising* yang digunakan oleh suatu organisasi filantropi, yaitu:

- a. *Dialogue Fundraising* merupakan strategi berdialog langsung dan bertatap muka dalam memperoleh sumber dana.
- b. *Multichannel Fundraising* merupakan penggunaan media dan saluran, seperti: melalui telepon, penggunaan website online dan relasi komunitas online.
- c. *Retention and Development* merupakan bentuk mempertahankan loyalitas donatur sekaligus membangun hubungan yang baik pada donatur agar terciptanya pelayanan yang berkualitas kepada donatur.

## C. Konsep Program Sedekah

### 1. Program Sedekah

Program sedekah pada organisasi filantropi merupakan sebuah upaya terstruktur dalam menyelesaikan permasalahan sosial atau kemanusiaan, dengan berupa kegiatan program pengumpulan yang dilaksanakan dengan prinsip ZIS (Zakat, Infaq dan Sedekah).<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Nugroho Ahmad Yuanfahmi and Skripsi Ahmad, "Analisis Pengelolaan Dan Permasalahan Wakaf Uang Di Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang" (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015).

<sup>28</sup> Eka Suci Fitriani, Raden Agrosamdhyo, and Ely Mansur, "Strategi Pengumpulan Dan Penyaluran Zakat, Infaq, Dan Sedekah (ZIS) Dalam Program Sebar Sembako Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bali," *Widya Balina* 5, no. 1 (2020): 68–77, <https://doi.org/10.53958/wb.v5i1.52>.

Pendayagunaan program sedekah untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin ialah dengan pemanfaatan sumber dana yang telah dikumpulkan guna mendorong masyarakat agar dapat memiliki usaha sendiri.<sup>29</sup> Program sedekah juga dapat dimanfaatkan dalam upaya pembangunan sebuah bangunan yang nantinya dapat digunakan dalam kegiatan sosial maupun kegiatan umat muslim.

## 2. Rukun Program Sedekah

Rukun program sedekah terbagi menjadi empat.<sup>30</sup> Pertama, sigat yang terdiri dari ijab yaitu pengucapan ataupun perbuatan yang menunjukkan seseorang atau kelompok telah menyerahkan barang kepada penerima dan kabul yaitu pengucapan atau perbuatan yang menunjukkan bahwa penerima telah menerima barang tersebut. Kedua, pelaku sedekah merupakan seseorang yang sudah balig, cakap untuk berderma dan berakal. Ketiga, penerima sedekah merupakan seseorang yang mampu memanfaatkan harta sedekah dan sudah sedekah tersebut sudah ijab dan kabul atau sudah sah. Keempat, objek sedekah merupakan barang yang disedekahkan dengan syarat harus bernilai, karena jika barang tersebut tidak bernilai secara ekonomi maka tidak dapat disebut sebagai harta.

## D. Konsep Manajemen Program

### 1. Pengertian Manajemen Program

Manajemen berasal dari bahasa Latin, yang berasal dari kata dasar "manus" yang berarti tangan, dan "agree" yang berarti melakukan. Dalam bahasa Inggris, manajemen diterjemahkan dari kata "to manage" yang berarti mengelola. Manajemen merupakan gabungan ilmu dan seni

---

<sup>29</sup> Abdul Kholiq, "Pendayagunaan Zakat, Infak Dan Sedekah Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin Di Kota Semarang," *Riptek* 6, no. 1 (2012): 39-47.

<sup>30</sup> Abu Abdillah IRSAN and Khairil Anwar, "Analisis Nilai-Nilai Psikologis Hukum Islam Dalam Wasiat," *Al-Majaalis* 10, no. 1 (2022): 1-15, <https://doi.org/10.37397/almajaalis.v10i1.246>.



dalam melakukan tindakan untuk mencapai tujuan. G.R. Terry menggambarkan manajemen sebagai sebuah proses yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pelaksanaan, dan pengawasan dengan menggunakan ilmu dan seni untuk mencapai tujuan yang telah disepakati sebelumnya.<sup>31</sup>

Program bisa dianggap sebagai rangkaian aktivitas yang menerapkan kebijakan. Pada umumnya, program diartikan sebagai "rencana" yang akan dilaksanakan oleh individu atau organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Namun, ketika program tersebut dievaluasi, definisi programnya menjadi sebuah kesatuan tindakan yang mewujudkan kebijakan. Proses ini berlangsung secara berkelanjutan dan akan melibatkan sekelompok orang di dalam sebuah organisasi.<sup>32</sup>

Maka, dapat disimpulkan bahwasannya manajemen program merupakan proses untuk merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, melaksanakan, dan mengawasi sumber daya dalam program-program yang telah dirancang untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

## 2. Fungsi Manajemen Program

### a. Perencanaan (Planning)

Perencanaan adalah serangkaian tindakan dan proses yang bertujuan untuk menetapkan tujuan pada periode tertentu serta langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Menurut Terry, perencanaan merupakan proses fundamental yang melibatkan pemilihan dan pengaitan fakta, serta membuat dan menggunakan perkiraan mengenai masa depan. Ini melibatkan merumuskan aktivitas yang diusulkan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

---

<sup>31</sup> Siswanto, *Pengantar Manajemen* (Jakarta: Bumi aksara, 2018).

<sup>32</sup> Suharsimi dan Cepi Safruddin Abdul Jabar Arikunto, *Evaluasi Program Pendidikan: Pedoman Teoritis Praktis Bagi Mahasiswa Dan Praktisi Pendidikan*. (Jakarta: Bumi aksara, 2008).

b. Pengorganisasian (Organizing)

Pengorganisasian adalah proses dan serangkaian kegiatan yang melibatkan pembagian tugas yang telah direncanakan untuk dilakukan oleh anggota kelompok kerja, penetapan hubungan yang baik di antara mereka, dan penyediaan lingkungan serta fasilitas kerja yang mendukung. Menurut H. B. Siswanto, pengorganisasian merupakan pembagian kerja yang telah direncanakan untuk diselesaikan oleh anggota unit kerja, penetapan hubungan yang efektif di antara mereka, dan penyediaan lingkungan serta fasilitas kerja yang memadai sehingga mereka dapat bekerja dengan efisiensi.

c. Penggerakan (Actuating)

Penggerakan merujuk pada tindakan seorang atasan untuk memberikan petunjuk atau arahan kepada bawahannya di dalam konteks kelompok resmi dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama. Proses penggerakan ini mencakup pemberian bimbingan, petunjuk, dan instruksi kepada bawahan untuk memastikan pelaksanaan rencana yang telah disepakati. Selain itu, pergerakan juga mencakup penerapan berbagai prosedur operasional, panduan, dan prinsip manajemen yang berfokus pada pencapaian tujuan tertentu.

d. Pengendalian (Controlling)

Pengendalian merupakan proses dan rangkaian kegiatan untuk mengusahakan agar suatu pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan tahapan yang harus dilalui. Dengan demikian apabila terdapat kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana tahapan tersebut diadakan suatu tindakan perbaikan.

Terdapat beragam cara untuk melakukan perbaikan, seperti mengubah rencana atau tujuan, menyesuaikan ulang tugas-tugas, atau mengubah tingkat kewenangan. Namun, semua perubahan ini bergantung pada tindakan manusia. Individu yang bertanggung

jawab atas kesalahan yang tidak diinginkan harus diidentifikasi, dan langkah-langkah perbaikan harus diambil terhadap tindakan yang telah dilakukan atau akan dilakukan.

### 3. Prinsip-prinsip Manajemen

Menurut Henry Fayol, prinsip-prinsip manajemen terbagi menjadi 14 bagian, yaitu:

- a. Prinsip pembagian kerja, adalah usaha untuk membagi pekerjaan ke dalam berbagai bagian sumber daya manusia yang ada di dalam lingkaran manajemen, bertujuan untuk memperoleh pengalaman dan meningkatkan keahlian mereka secara berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan keuntungan.
- b. Prinsip wewenang dan tanggung jawab, kepada anggota tim manajemen perlu ditekankan untuk memastikan bahwa mereka dapat maksimal dalam menjalankan tugas-tugasnya. Wewenang yang diberikan harus diimbangi dengan tanggung jawab yang sesuai, sehingga terjaga keseimbangan antara kekuasaan dan tanggung jawab.
- c. Prinsip disiplin, prinsip disiplin sangat terkait dengan penerapan wewenang. Jika wewenang seorang manajer tidak dijalankan dengan baik, ada kemungkinan bahwa prinsip kedisiplinan akan terganggu.
- d. Prinsip kesatuan perintah, menetapkan bahwa setiap bawahan harus menerima instruksi hanya dari satu manajer di atasnya dan bertanggung jawab kepada manajer tersebut. Jika seorang bawahan diperintah oleh beberapa manajer, hal ini dapat menyebabkan kebingungan dan konflik. Dengan prinsip ini, bawahan akan jelas mengetahui kepada siapa ia harus bertanggung jawab dan kesalahan dapat diminimalisir karena ada kejelasan dalam struktur tanggung jawab.

- e. Prinsip kesatuan pengarahan, menyatakan bahwa setiap komunitas kerja yang memiliki tujuan yang sama harus dipimpin oleh satu manajer saja.
- f. Prinsip subordinasi, Kepentingan Perseorangan terhadap Kepentingan Umum menekankan bahwa kepentingan individu harus ditempatkan di bawah kepentingan organisasi secara keseluruhan. Fokus utama haruslah pada pencapaian tujuan organisasi, bukan tujuan individu.
- g. Prinsip penggajian Pegawai, menegaskan pentingnya manajemen memperhatikan besaran gaji yang diberikan kepada anggota tim manajemen. Gaji tersebut haruslah adil dan memuaskan, sehingga diharapkan dapat memotivasi pegawai untuk bekerja maksimal dalam mencapai tujuan perusahaan.
- h. Prinsip pemusatan, menetapkan batasan sejauh mana perintah dalam organisasi harus dijalankan, untuk mencegah tindakan sewenang-wenang dari manajer puncak.
- i. Prinsip Rangkaian Perintah, menetapkan bahwa perintah harus disampaikan dari tingkat manajemen yang lebih tinggi ke tingkat yang lebih rendah dengan jarak yang terdekat. Ini berarti bahwa tidak ada kelonggaran untuk melewati tingkat struktur dalam suatu organisasi saat memberikan perintah.
- j. Prinsip Ketertiban, dapat terwujud ketika semua bagian dalam organisasi, baik atasan maupun bawahan, menjaga prinsip disiplin yang tinggi.
- k. Prinsip Keadilan dan Kejujuran, dianggap mampu mendorong ketaatan dan kesetiaan bawahan terhadap atasan mereka. Ketaatan dan kesetiaan ini dapat direalisasikan melalui tindakan manajer yang adil dan jujur dalam kepemimpinan, sehingga memunculkan rasa ketaatan dan ketaatannya dari bawahan kepada atasan mereka.

- l. Prinsip Stabilitas Masa Jabatan dalam Kepegawaian menekankan bahwa manajemen harus menempatkan pegawai di posisi yang sesuai untuk mengurangi perputaran pegawai yang dapat mengganggu kelancaran pekerjaan.
- m. Prinsip Prakarsa, menekankan pentingnya melibatkan pegawai dalam proses manajemen dengan memberi mereka kesempatan untuk mengemukakan ide-ide baru. Hal ini akan merangsang minat pegawai untuk terlibat aktif dalam menciptakan nilai tambah untuk kemajuan organisasi.
- n. Prinsip semangat kesatuan, menekankan pentingnya bagi manajer untuk mengembangkan semangat kesatuan di antara bawahannya dengan memiliki kemampuan kepemimpinan yang baik. Melalui kemampuan tersebut, manajer dapat mendorong anggota tim untuk menjalankan tugas mereka dengan penuh kesadaran dan kenyamanan, tanpa adanya unsur paksaan.

#### 4. Unsur-unsur Manajemen

Unsur manajemen terbagi menjadi enam bagian, yaitu:

##### a. Manusia

Manusia merupakan unsur yang paling krusial dalam menentukan keberhasilan suatu organisasi. Mereka adalah motor penggerak di dalam organisasi dan memiliki peran, harapan, serta gagasan yang penting.

##### b. Uang

Uang dianggap sebagai alat yang digunakan untuk mencapai tujuan karena segala sesuatu harus dipertimbangkan secara rasional. Ini berarti bahwa kebutuhan akan uang akan berkorelasi dengan jumlah yang harus disiapkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

c. Metode

Metode dapat dijelaskan sebagai berbagai cara atau teknik yang digunakan dalam upaya mencapai tujuan tertentu dengan harapan memperoleh hasil yang berkualitas.

d. Material

Material merupakan salah satu unsur dalam manajemen. Material merujuk pada bahan-bahan atau barang yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

e. Mesin

Mesin merupakan alat yang digunakan dalam proses produksi. Dalam konteks unsur manajemen, mesin mengacu pada peralatan atau alat-alat yang diperlukan atau digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

f. Pasar

Pasar adalah tempat di mana produk atau jasa yang dihasilkan dipasarkan. Keberadaan pasar memungkinkan produk dan jasa yang diproduksi dapat terjual dengan sukses kepada konsumen yang tepat.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Yayat M. Herujito, *Dasar-Dasar Manajemen* (Jakarta: Gramedia, 2001).